

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2025

**Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Pangkalpinang**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan untuk periode tahun 2025. Rencana ini merupakan upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pengembangan infrastruktur perumahan dan Kawasan permukiman yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks di sektor perumahan dan permukiman, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melakukan kajian mendalam dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Kami berkomitmen untuk mewujudkan visi pembangunan perumahan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sesuai dengan arah kebijakan nasional maupun lokal.

Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat menjadi panduan utama bagi seluruh jajaran Dinas Perumahan dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh dedikasi serta profesionalisme. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari internal maupun eksternal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kami sadar sepenuhnya bahwa implementasi rencana ini akan menghadapi berbagai tantangan. Namun, dengan dukungan semua pihak terkait, kami yakin dapat mengatasi setiap hambatan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami berharap rencana ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, dan menjadi landasan yang kokoh dalam membangun masa depan perumahan yang lebih baik untuk semua.

Pangkalpinang, 05 Mei 2025

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman

M.BELLY JAWARI, ST. M.Si
PEMBINA TK.I / IV b
NIP 197907252005011008

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	10
1.4. Sistematika Penyusunan	11
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH.....	13
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	29
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	33
3.1. Telaahan Terhadap Program Nasional.....	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan	40
3.3. Program dan Kegiatan	41
BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DAERAH.....	53
4.1. Kaidah Pelaksana Rencana Kerja Perubahan	53
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	54
BAB V PENUTUP.....	53
5.1. Uraian Penutup.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bagian Ketiga Pasal 12 Ayat 1 huruf d, menyatakan bahwa Bidang Perumahan dan Kawasan Perumahan adalah merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kota Pangkalpinang harus segera membentuk Kelembagaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Pangkalpinang yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Bagian Kedua Pasal 2 menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
- c. mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan terutama bagi MBR dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perubahan- SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) tahun 2025
3. Renja Perubahan SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan tahun sebelumnya
dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja Perubahan harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun ketiga RPJMD paruh ke empat dari RPJP-D Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dan hasil evaluasi penyelenggaraan RPJMD tahun 2024-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan Laporan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkin), merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi merepresentasikan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang khususnya pada bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

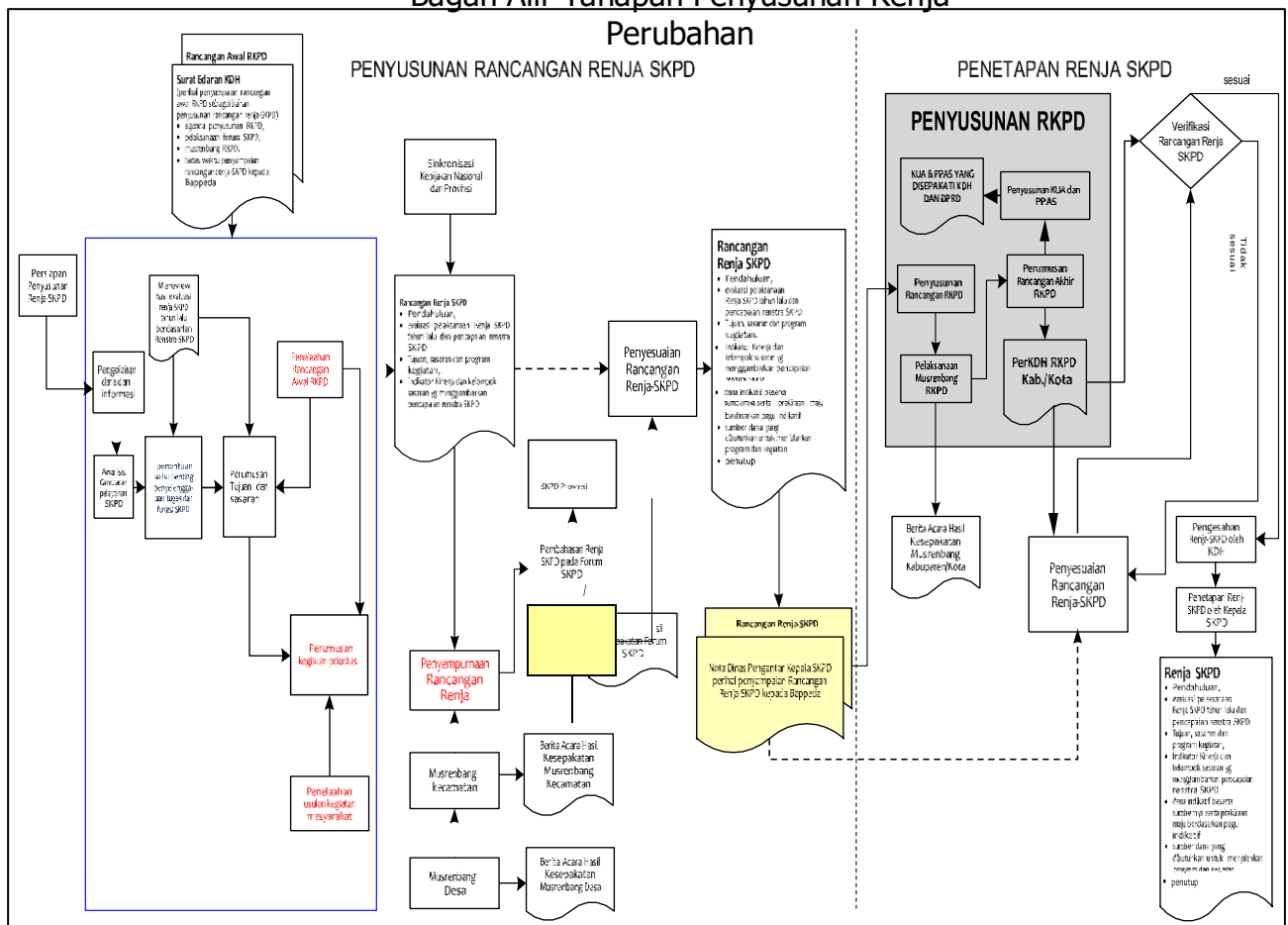
Selain itu juga sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja

Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



I.2. Landasan Hukum

Perencanaan Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang merupakan salah satu dokumen perencanaan yang tidak dapat terlepas dari Subtansi dokumen-dokumen peraturan dan perencanaan yang menjadi landasan dan acuan penyusunannya, Pembangunan perumahan dan permukiman dilandasi peraturan perundangan yang bersumber dari adanya amanat UUD 1945 Bab X Hak Asasi Manusia : " Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan ".

Amanat UUD 1945 tersebut secara hierarki dijabarkan dalam Undang-Undang yang antara lain meliputi :

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Barat dan Kab. Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun

- 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah.
 24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 25. Permen PU Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau Di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan;
 26. Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintahan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1540);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

- Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 seri E Nomor 03);
 30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
 31. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);
 32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
 33. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
 34. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
 35. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 54);
 36. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07 seri E Nomor 03);
 37. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

- Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Kota Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 6);
 39. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);
 40. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56).
 41. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144).
 42. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan SKPD adalah selain untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2025, juga untuk merumuskan arah kebijakan dasar

dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen Masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera

Sebagai tindaklanjut dari uraian diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang telah menyusun target yang akan dicapai oleh bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam periode tiga tahun ke depan meliputi:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengembangan, dan pengendalian bidang perumahan dan kawasan permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
3. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Kota Bekasi untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai;
4. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi;

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2025, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perubahan sampai dengan triwulan II tahun 2023, analisis kinerja pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perubahan SKPD, Arah Kebijakan, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Pangkalpinang yang mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana dan pencapaian Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 2.1. Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang sampai dengan triwulan 2 tahun 2023, berikut ini :

TRIWULAN IV
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Dinas Perumahan Dan Permukiman
Kota Pangkalpinang Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab						
								I		II		III		IV											
								1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	-	010401	PROGRAM PENUNJANG U R U S A N P E M E R I N T A H A N D A E R A H K A B U P A T E N / K O T A	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	0	14.764.124.234	0	0	74,860	5.819.882.712	74	709.834.983	74	1.684.902.048	74.000	1.359.348.623	74	1.628.238.633	74	5.382.324.287	74	5.382.324.287	100	36,455	SEKRETARIAT
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	0		0	80		70		75		80		80		80		80		100		SEKRETARIAT	
2		010401201	P e r e n c a n a a n , P e n g a n g g a r a n , d a n E v a l u a s i K i n e r j a P e r a n g k a t D a e r a h	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	0	52.392.500	0	0	100	14.466.000	20	0	40	0	75	4.455.000	100	7.695.000	100	12.150.000	100	12.150.000	100	23,190	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3		010401201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	42.181.500	0	0	1	12.970.000	1	0	1	0	1	4.455.000	1	7.695.000	1	12.150.000	1	12.150.000	100	28,804	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
4		010401201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	10.211.000	0	0	1	1.496.000	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	100	0	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
5		010401202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP (Dengan Satuan:%)	0	10.839.530.654	0	0	100	3.773.507.594	17,100	616.654.631	50	1.244.173.107	75	853.459.384	100	754.076.944	100	3.468.364.066	100	3.468.364.066	100	31,997	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
6		010401202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	10.608.227.654	0	0	35	3.691.253.106	30	604.518.783	28	1.219.969.335	28	835.255.612	28	726.848.248	28	3.386.591.978	28	3.386.591.978	100	31,924	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
7		010401202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	9.523.000	0	0	1	2.266.050	1	0	1	0	1	0	1	1.935.000	1	1.935.000	1	1.935.000	100	20,319	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
8		010401202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran/ SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan K e u a n g a n Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	221.780.000	0	0	18	79.988.438	4	12.135.848	9	24.203.772	14	18.203.772	18	25.293.696	18	79.837.088	18	79.837.088	100	35,998	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
9		010401203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir (Dengan Satuan:%)	0	46.398.000	0	0	100	101.086.784	15	15.514.464	50	31.271.696	75	23.271.696	100	31.028.928	100	101.086.784	100	101.086.784	100	100	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
10		010401203006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	46.398.000	0	0	1	101.086.784	1	15.514.464	1	31.271.696	1	23.271.696	1	31.028.928	1	101.086.784	1	101.086.784	100	100	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
11		010401204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase kontribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	0,185	3.198.700	0,046	0	0,092	0	0,138	0	0,182	2.865.000	0,182	2.865.000	0,182	2.865.000	100	100	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
12		010401204005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	12	1.599.350	3	0	6	0	9	0	12	1.435.000	12	1.435.000	12	1.435.000	100	100	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
13		010401204007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	12	1.599.350	3	0	6	0	9	0	12	1.430.000	12	1.430.000	12	1.430.000	100	100	SUB BAGIAN PEP DAN KEUANGAN
14		010401205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	0	472.500.000	0	0	20	133.543.392	5	3.878.616	5	87.742.924	5	5.817.924	5	7.757.232	5	105.196.696	5	105.196.696	100	22,264	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15		010401205002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	80.000.000	1	0	1	79.925.000	1	0	1	0	1	79.925.000	1	79.925.000	100	100	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
16		010401205003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	0	472.500.000	0	0	12	53.543.392	3	3.878.616	6	7.817.924	9	5.817.924	12	7.757.232	12	25.271.696	12	25.271.696	100	5,349	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
17		010401206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	0	1.247.269.000	0	0	100	553.990.726	7	33.622.496	50	140.581.418	75	142.277.699	100	213.583.503	100	530.065.116	100	530.065.116	100	42,498	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
18		010401206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	26.787.500	0	0	1	10.850.700	1	0	1	3.620.700	1	0	1	6.602.200	1	10.222.900	1	10.222.900	100	38,163	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
19		010401206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	2.160.000	0	0	1	8.500.000	1	0	1	1.850.000	1	3.650.000	1	2.100.000	1	7.600.000	1	7.600.000	100	100	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
20		010401206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	71.703.500	0	0	1	85.187.050	1	0	1	620.000	1	33.530.600	1	33.074.200	1	67.224.800	1	67.224.800	100	93,754	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
21		010401206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	36.700.000	0	0	2	35.718.000	2	0	2	14.012.000	2	0	2	19.062.000	2	33.074.000	2	33.074.000	100	90,120	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
22		010401206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	450.000.000	0	0	12	200.000.000	0	0	6	58.044.974	9	54.663.355	12	85.500.111	12	198.208.440	12	198.208.440	100	44,046	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
23		010401206010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	98.500.000	0	0	12	28.271.696	3	4.378.616	6	8.567.924	9	6.567.924	10	8.757.232	10	28.271.696	10	28.271.696	100	28,702	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
24		010401206011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	544.500.000	0	0	12	185.463.280	3	29.243.880	6	53.865.820	9	43.865.820	10	58.487.760	10	185.463.280	10	185.463.280	100	34,061	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
25		010401208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	0	1.132.865.880	0	0	100	359.637.516	12	40.164.776	50	116.558.359	75	81.286.685	100	101.917.608	100	339.927.428	100	339.927.428	100	30,006	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
26		010401208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	135.597.600	0	0	12	50.543.392	3	7.757.232	6	15.635.848	9	11.635.848	12	15.514.464	12	50.543.392	12	50.543.392	100	37,275	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab							
								I		II		III		IV												
								9		10		11		12						13		14		15		16
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
27		010401208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	404.500.000	0	0	12	86.981.000	3	0	6	26.105.395	9	22.728.829	12	19.612.488	12	68.446.712	12	68.446.712	100	16,921	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
28		010401208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	592.768.280	0	0	12	222.113.124	3	32.407.544	6	74.817.116	9	46.922.008	12	66.790.656	12	220.937.324	12	220.937.324	100	37,272	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
29		010401209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	0	973.168.200	0	0	100	880.452.000	5	0	50	64.574.544	60	248.780.235	100	509.314.418	100	822.669.197	100	822.669.197	100	84,535	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
30		010401209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	525.263.200	0	0	1	40.450.000	1	0	1	11.823.298	1	7.507.796	1	19.231.287	1	38.562.381	1	38.562.381	100	7,342	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
31		010401209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	89.100.000	0	0	14	193.380.000	14	0	14	30.904.246	14	30.406.039	14	78.487.131	14	139.797.416	14	139.797.416	100	100	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
32		010401209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	78.330.000	0	0	20	44.975.000	20	0	20	21.847.000	20	11.088.400	20	11.999.000	20	44.934.400	20	44.934.400	100	57,366	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
33		010401209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	280.475.000	0	0	1	601.647.000	1	0	1	0	1	199.778.000	1	399.597.000	1	599.375.000	1	599.375.000	100	100	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						100,000	36,455			
PREDIKAT KINERJA																						ST	SR			
34	-	010402	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana (Dengan Satuan:%)	0	6.412.436.649	0	0	100	1.601.336.115	15	194.150.248	50	266.749.060	75	430.523.046	100	602.674.168	100	1.494.096.522	100	1.494.096.522	100	23,300	BIDANG PERUMAHAN	
35		010402201	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi yang terlaksana (Dengan Satuan:%)	0	463.557.870	0	0	100	220.524.480	9	17.393.080	50	70.448.800	75	73.279.620	100	49.371.160	100	210.492.660	100	210.492.660	100	45,408	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	
36		010402201002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	104.460.180	0	0	1	28.430.696	1	3.378.616	0	7.067.924	1	9.987.924	1	7.216.232	1	27.650.696	1	27.650.696	100	26,470	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	
37		010402201003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dengan Satuan:Dokumen)	0	150.000.180	0	0	1	929.000	1	0	0	0	0	0	1	459.000	2	459.000	2	459.000	100	0,306	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	
38		010402201004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	105.789.855	0	0	1	29.997.696	1	3.378.616	1	7.067.924	1	5.067.924	1	7.756.232	1	23.270.696	1	23.270.696	100	21,997	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	
39		010402201006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dengan Satuan:Dokumen)	0	103.307.655	0	0	1	41.195.696	1	3.378.616	0	7.312.924	1	22.817.924	1	7.216.232	1	40.725.696	1	40.725.696	100	39,422	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
40		010402201009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:dokumen)	0	0	0	0	1	119.971.392	0	7.257.232	0	49.000.028	0	35.405.848	1	26.723.464	1	118.386.572	1	118.386.572	100	100	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
41		010402202	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah (Dengan Satuan:%)	0	435.272.655	0	0	100	82.458.746	9	4.378.616	50	8.567.924	75	33.220.496	100	29.259.492	100	75.426.528	100	75.426.528	100	17,329	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
42		010402202001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	135.270.060	0	0	20	20.975.000	0	0	0	0	20	9.321.494	20	11.279.000	20	20.600.494	20	20.600.494	100	15,229	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
43		010402202004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Dengan Satuan:Orang)	0	300.002.595	0	0	20	5.709.000	0	0	0	0	0	0	20	5.534.000	20	5.534.000	20	5.534.000	100	1,845	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
44		010402202009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	50	55.774.746	0	4.378.616	0	8.567.924	20	23.899.002	30	12.446.492	30	49.292.034	30	49.292.034	100	100	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
45		010402203	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	0	400.006.740	0	0	100	12.500.000	5	0	50	0	0	0	0	0	50	0	50	0	100	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
46		010402203001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Dengan Satuan:Unit Rumah)	0	400.006.740	0	0	2	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
47		010402205	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dengan Satuan:%)	0	3.913.636.484	0	0	100	1.088.458.285	20	157.659.104	50	140.017.918	75	285.518.804	100	443.793.612	100	1.026.989.438	100	1.026.989.438	100	26,241	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
48		010402205002	Pemantauan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dengan Satuan:Dokumen)	0	3.913.636.484	0	0	12	1.088.458.285	3	157.659.104	6	140.017.918	9	285.518.804	12	443.793.612	12	1.026.989.438	12	1.026.989.438	100	26,241	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
49		010402206	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase layanan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	0	1.050.039.000	0	0	100	185.494.704	9	14.719.448	50	46.514.418	75	38.504.126	100	70.634.904	100	170.372.896	100	170.372.896	100	16,225	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
50		010402206001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	375.015.150	0	0	1	101.502.842	1	11.340.832	1	25.813.248	1	19.881.248	1	41.922.624	1	98.957.952	1	98.957.952	100	26,388	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
51		010402206003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	375.034.900	0	0	1	71.279.496	1	3.378.616	1	20.701.170	1	18.622.878	1	18.315.314	1	61.017.978	1	61.017.978	100	16,270	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab						
								I		II		III		IV											
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
52		010402206004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Dengan Satuan:Laporan)	0	149.999.150	0	0	1	12.712.366	0	0	0	0	0	0	1	10.396.966	1	10.396.966	1	10.396.966	100	6,931	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
53		010402207	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Persentase Fasilitas Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (Dengan Satuan:%)	0	149.923.900	0	0	100	11.899.900	5	0	50	1.200.000	75	0	100	9.615.000	100	10.815.000	100	10.815.000	100	7,214	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
54		010402207001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) (Dengan Satuan:Laporan)	0	149.923.900	0	0	1	11.899.900	0	0	0	1.200.000	1	0	1	9.615.000	1	10.815.000	1	10.815.000	100	7,214	SUB KOORDINATOR PENYEDIAAN RUMAH KORBAN BENCANA DAN RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																					100,000	23,300			
PREDIKAT KINERJA																						ST	SR		
55	-	010403	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (Dengan Satuan:%)	0	17.475.625.000	0	0	86	2.715.613.536	96	76.520.872	96	1.111.123.732	98	765.681.136	98	726.208.617	98	2.679.534.357	98	2.679.534.357	100	15,333	BIDANG PERMUKIMAN
56		010403201	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Izin Pengembangan Kawasan Permukiman yang terlaksana (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	77.906.392	11	7.757.232	45	20.494.556	75	21.757.456	100	27.401.394	100	77.410.638	100	77.410.638	100	100	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
57		010403201001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	77.906.392	1	7.757.232	1	20.494.556	1	21.757.456	1	27.401.394	1	77.410.638	1	77.410.638	100	100	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
58		010403202	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Dengan Satuan:%)	0	912.000.000	0	0	60	239.694.880	7	17.893.080	40	61.609.836	75	65.663.620	80	87.009.892	80	232.176.428	80	232.176.428	100	25,458	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
59		010403202001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Dokumen)	0	625.740.000	0	0	1	113.774.992	1	6.757.232	1	26.382.848	1	31.735.848	1	48.062.464	1	112.938.392	1	112.938.392	100	18,049	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
60		010403202003	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Kelompok Masyarakat)	0	0	0	0	1	78.395.192	1	7.757.232	1	15.635.848	1	22.879.848	1	26.056.266	1	72.329.194	1	72.329.194	100	100	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
61		010403202004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	24.574.696	1	3.378.616	1	7.067.924	1	5.067.924	1	9.060.232	1	24.574.696	1	24.574.696	100	100	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
62		010403202007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	22.950.000	1	0	1	12.523.216	1	5.980.000	1	3.830.930	1	22.334.146	1	22.334.146	100	100	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
63		010403203	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha (Dengan Satuan:%)	0	16.563.625.000	0	0	40	2.398.012.264	10	50.870.560	20	1.029.019.340	30	678.260.060	40	611.797.331	40	2.369.947.291	40	2.369.947.291	100	14,308	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
											I		II		III		IV								
											9		10		11		12								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
64		010403203007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	446.120.000	0	0	1	43.080.000	1	3.378.616	1	7.067.924	1	5.067.924	1	26.785.232	1	42.299.696	1	42.299.696	100	9,482	SUB KOORDINATOR PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
65		010403203009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Dengan Satuan:Ha)	0	0	0	0	10	2.354.932.264	0	47.491.944	0	1.021.951.416	0	673.192.136	0	585.012.099	0	2.327.647.595	0	2.327.647.595	0	100	SUB KOORDINATOR PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						100,000	15,333		
PREDIKAT KINERJA																						ST	SR		
66	-	010404	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	97	640.371.788	20	11.885.848	45	88.269.508	75	503.151.447	97	36.043.696	97	639.350.499	97	639.350.499	100	100	BIDANG PERMUKIMAN
67		010404201	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	0	640.371.788	1	11.885.848	1	88.269.508	1	503.151.447	1	36.043.696	1	639.350.499	1	639.350.499	100	100	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
68		010404201001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Dengan Satuan:Unit Rumah)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Dengan Satuan:Unit Rumah)	0	0	0	0	16	640.371.788	0	11.885.848	0	88.269.508	8	503.151.447	8	36.043.696	8	639.350.499	8	639.350.499	100	100	SUB KOORDINATOR PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						100,000	100,000		
PREDIKAT KINERJA																						ST	ST		
69	-	010405	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi PSU (Dengan Satuan:%)	0	7.635.555.055	0	0	97,200	1.215.127.498	10	36.741.144	50	698.303.300	75	136.692.124	98	29.802.834	98	901.539.402	98	901.539.402	100	11,807	BIDANG PERUMAHAN
70		010405201	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang dibangun (Dengan Satuan:Unit)	0	7.635.555.055	0	0	9	1.215.127.498	1	36.741.144	1	698.303.300	2	136.692.124	2	29.802.834	2	901.539.402	2	901.539.402	100	11,807	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN
				Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan (Dengan Satuan:%)	0		0		100		10		60		80		100		100		100	100	100	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN	
71		010405201001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	350.990.385	0	0	1	89.152.192	1	10.340.832	0	33.550.500	1	18.202.248	1	7.170.416	1	69.263.996	1	69.263.996	100	19,734	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN
72		010405201002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Dengan Satuan:Lokasi)	0	7.103.626.120	0	0	10	1.033.697.922	1	22.021.696	1	654.969.876	2	96.432.544	2	12.360.848	2	785.784.964	2	785.784.964	100	11,062	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN
73		010405201003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	180.938.550	0	0	1	55.195.000	1	4.378.616	1	8.567.924	1	15.579.454	1	2.189.308	1	30.715.302	1	30.715.302	100	16,976	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2024								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2024	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
										I		II		III		IV									
										9	10	11	12	13	14	15	16								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
74		010405201005	Verifikasi dan PSU dari Pengembangan	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	37.082.384	1	0	1	1.215.000	1	6.477.878	1	8.082.262	1	15.775.140	1	15.775.140	100	100	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS (PSU) PERUMAHAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						100,000	11,807		
PREDIKAT KINERJA																						ST	SR		
75	-	010406	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	1.200.000	8	0	30	0	60	0	100	719.000	100	719.000	100	719.000	100	100	BIDANG PERUMAHAN
76		010406201	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Layanan Sertifikasi dan Registrasi yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	1.200.000	5	0	30	0	60	0	100	719.000	100	719.000	100	719.000	100	100	SUB KOORDINATOR PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERUMAHAN
77		010406201001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	1.200.000	0	0	0	0	0	0	1	719.000	1	719.000	1	719.000	100	100	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						100,000	100,000		
PREDIKAT KINERJA																						ST	ST		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																						100,000	47,816		
PREDIKAT KINERJA																						ST	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- Kesiapan Tim pelaksana																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Adanya kendala dilapangan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:				--																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:				--																					

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang terbentuk pada tanggal 03 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.

Dalam mencapai target kinerjanya, dibutuhkan peran serta dan dukungan dari berbagai pihak, dan juga dibutuhkan dukungan dana serta ide kreatif, hal ini tidak bisa hanya dikerjakan dan ditumpukan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang dan Kasi yang membidangnya, inilah yang menjadi kendala diinternal Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kota Pangkalpinang.

Secara garis besar permasalahan pokok kinerja pelayanan bidang perumahan dan permukiman meliputi; rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, serta menurunnya kualitas permukiman dengan masih besarnya luasan kawasan kumuh diperkotaan.

Adapun permasalahan pokok air bersih meliputi;

rendahnya peningkatan pelayanan air minum di perkotaan dan perdesaan, serta rendahnya kualitas manajemen pengelolaan air minum. Sedangkan permasalahan pokok air limbah adalah masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistim air limbah terpusat (sistim sewerage), serta belum memadainya pelayanan sanitasi yang dapat memberikan kontribusi pencemaran terhadap air permukaan dan air tanah.

Permasalahan pokok persampahan meliputi;

masih rendahnya tingkat capaian pelayanan sampah di perkotaan, serta masih lemahnya manajemen dan operasional teknis pengelolaan sampah.

Sedangkan masih luasnya daerah genangan serta banyak terjadinya banjir di kawasan perkotaan merupakan permasalahan pokok dalam penanganan drainase.

Dalam hal penataan bangunan terdapat permasalahan mendasar yaitu masih rendahnya penegakan aturan keselamatan bangunan, serta masih diperlukannya pembinaan teknis dalam pembangunan gedung.

Adapun dalam bidang pengembangan perkotaan, permasalahan pokok meliputi;

perkembangan perkotaan yang tidak seimbang antara kota-kota metropolitan/besar dengan kota-kota menengah dan kecil, serta memburuknya kualitas fisik kawasan perkotaan, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat perkotaan karena keterbatasan pelayanan kebutuhan dasar perkotaan yang banyak dipicu oleh adanya tingkat urbanisasi yang tinggi.

Mengingat permasalahan pokok dalam bidang perumahan dan permukiman tersebut yang secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka pada pelaksanaan pembangunannya disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Dengan tersusunnya perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing bidang kegiatan. Menurut Lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang

Pemerintahan Daerah Huruf D, Sub Urusan Bidang Perumahan dan Permukiman memiliki 4 (empat) Urusan yaitu :

1. Perumahan

Pembagian Urusan untuk Perumahan, Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan dalam hal :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- c. Fasilitasi Site Plan pembangunan dan pengembangan perumahan; dan
- d. Fasilitasi Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).

2. Permukiman

Pembagian Urusan untuk Permukiman, Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan dalam hal :

- a. Pengkajian dan Pengawasan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- b. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha.

3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Pembagian Urusan untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan dalam hal Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota

4. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)

Pembagian Urusan untuk Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam hal Penyelenggaraan PSU perumahan.

Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang adalah sesuai tabel berikut:

Tabel 2.3

Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang
Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perubahan SKPD Tahun 2019	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD tahun 2024)	Unit OPD Penanggung Jawab
1	3	7		12	13	14 = 6 + 12	16
		K	Rp	Rp	Rp	Rp	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		5,819,882,712	5,382,324,287	100%	5,382,324,287	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata Capaian Kinerja Predikat Kinerja				100% T		
2	Program Pengembangan Perumahan		1,601,336,115	1,494,096,522	100%	1,494,096,522	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja				100% T		
3	Program Kawasan Permukiman		2,715,613,536	2,679,534,357	100%	2,679,534,357	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja				100% T		
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		640,371,788	639,350,499	100%	639,350,499	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja				100% T		
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)		1,215,127,498	901,539,402	100%	901,539,402	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja				100% T		

6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman		1,200,000	719,000	100%	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	Rata-rata capaian kinerja (%)				100%		
	Predikat Kinerja				T		
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM	11,993,531,649	11,365,192,509			11,365,192,509	
	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 6)				100%		
	PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D. PROGRAM 6)				T		

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam menopang pembangunan berkelanjutan maka perlu didukung beberapa langkah-langkah strategis yang diestimasi akan berpengaruh dalam pembangunan daerah ini, untuk itu diperlukan adanya identifikasi sekaligus tindakan analisis. Faktor strategis yang berpengaruh terhadap arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu 2024-2026 dapat dianalisis melalui lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut:

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Jumlah Kekurangan Rumah (Backlog) dan rendahnya angka pemenuhan rumah terutama bagi MBR;
2. Rendahnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang belum memadai.

1.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, terdapat beberapa program dan kegiatan yang mengalami perubahan dikarenakan adanya penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga program yang dilaksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengembangan Perumahan
3. Program Kawasan Permukiman
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kmuh
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, maupun perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang di tingkatan kelurahan, kecamatan maupun Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

Kebijakan dan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan

program-program pembangunan, maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni yang dilengkapi sarpras PSU, dan pengentasan Kawasan kumuh, terkendala perilaku atau pola pikir beberapa masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses penganggaran dan pembangunan program pemerintah;
- b. Menurunnya kualitas lingkungan permukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan;
- c. Terbatasnya pengembangan Prasarana dan Sarana Umum (PSU) dan Infrastruktur dasar perumahan seperti jalan lingkungan/jalan setapak, jembatan gantung/plat, drainase, Ruang Terbuka Publik dsb;

2.5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

- A. Peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) bagi masyarakat untuk memberikan jaminan kepastian bermukim bagi masyarakat melalui :
 - 1) Pemberian bantuan pembangunan rumah baru layak huni;
 - 2) Rekonstruksi dan rehabilitasi bangunan, prasarana dan sarana di lingkungan perumahan yang terkena bencana alam dan korban relokasi program pemerintah;

- 3) Penyusunan Pedoman, standar dan petunjuk teknis pelaksanaan;
- 4) fasilitasi termasuk moneyv pra-sertifikasi dan pasca-sertifikasi rumah bersubsidi serta realisasi pembangunan dan pemanfaatannya;
- 5) Pemuktahiran data perumahan;
- 6) pengembangan RUSUNAWA.

B. Meningkatkan kenyamanan dan kesehatan lingkungan perumahan melalui:

- 1) Pembangunan PSU Lingkungan Perumahan;
- 2) Pemeliharaan PSU Lingkungan Perumahan;
- 3) Peningkatan peran masyarakat dalam penyediaan PSU Lingkungan Perumahan;
- 4) Pemuktahiran data kawasan lingkungan permukiman kumuh

2.5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pemenuhan layanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan/atau relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan penataan dan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
3. Meningkatkan pelaksanaan penataan dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi.
4. Meningkatkan pelaksanaan penanganan Kawasan permukiman kumuh
5. Meningkatkan Pelaksanaan Prasarana, Sasaran dan Utilitas Umum (PSU)
6. Meningkatkan Layanan Sertifikasi dan Registrasi Pelaksanaan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan Terhadap Program Nasional

Mengacu pada Renstra Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 pada point 3.3.4 tentang ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR YANG MENDUKUNG “Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau”, dijelaskan bahwa :

Tujuan ketiga pada Renstra Kementerian PUPR adalah terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sedangkan untuk Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bangka Belitung yang mengacu pada Visinya yaitu “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”, dan Misi I yaitu Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang permukiman dan perumahan pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat dan pembangunan kewilayahan dan pemerataan dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta percepatan proyek strategis pembangunan nasional yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dengan

menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus, maka Kementerian PUPR juga mengarahkan kebijakan pembangunan bidang permukiman dan perumahan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan/wilayah prioritas nasional dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau terluar, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional, melalui ;

- a) Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni: cakupan pelayanan akses air minum, penanganan permukiman kumuh perkotaan, dan cakupan pelayanan akses sanitasi;
- b) Peningkatan penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan: penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni dan peningkatan rumah yang layak huni; serta
- c) Peningkatan dukungan pembiayaan rumah yang layak huni dan berkelanjutan: penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni, dan peningkatan aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga MBR.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN

Pembinaan dan Pengembangan Permukiman diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional dan SDGs serta mendukung penyelenggaraan agenda prioritas nasional pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman menggunakan tiga strategi pendekatan

yaitu membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Dalam membangun sistem, Kementerian PUPR memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota pada kawasan yang memiliki fungsi strategis secara nasional. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah, bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat, bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan infrastruktur permukiman melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui pengembangan perumahan dan pengembangan pembiayaan perumahan dilaksanakan untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional dimensi manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, juga dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan fisik terbangun (jaringan infrastruktur), potensi pengembangan dan daya tampung wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, serta kejadian bencana. Maka dari itu, arah Kebijakan pengembangan perumahan difokuskan pada prioritas pembangunan nasional:

- a) kawasan industri/KEK,
- b) Kawasan pariwisata,
- c) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana,

- d) Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi,
- e) keterkaitan desa dan kota
- f) kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga (187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk didalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar),
- g) daerah tertinggal, dan
- h) pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (melalui bansos rumah swadaya pada masyarakat nelayan dan pekerja industri perikanan dll).

Selain itu arah Kebijakan pengembangan perumahan juga difokuskan pada program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional yang sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR, yaitu peningkatan kontribusi pengembangan perumahan bagi MBR dengan memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui pembiayaan perumahan berdasarkan dukungan yang dilaksanakan untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional dimensi manusia dan masyarakat, serta dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, maka arah Kebijakan pembiayaan perumahan, difokuskan pada prioritas pembangunan nasional, yang utamanya untuk kawasan/wilayah:

- a) kawasan industri/KEK;
- b) Kawasan pariwisata;
- c) pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana;

- d) Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi;
- e) keterkaitan desa dan kota;
- f) kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga 187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk didalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar);
- g) daerah tertinggal; dan
- h) dukungan pengurangan beban penduduk miskin dan rentan, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR adalah memperluas akses terhadap fasilitas pembiayaan tempat tinggal yang layak bagi MBR yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan serta pendekatan demand management dengan prioritas nasional.

Visi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024 adalah:
"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan".

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat adalah :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan;

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, maka tujuan pembangunan jangka menengah yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam;
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing;
3. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
4. Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan
5. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian dalam dalam periode 2020-2024, adalah meningkatnya kehandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan:

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air;
2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional;
3. Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman yang Layak, Aman dan Terjangkau;

4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional; dan
5. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknik Lainnya.

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mendukung pencapaian sasaran ke-3 : Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian PU dan Perumahan Rakyat tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Pangkalpinang
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan
Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau.	Kurangnya Kesadaran dan peran serta masyarakat untuk Bersama-sama berusaha keluar dari zona kumuh	Pemberian izin membangun diatas tanah masyarakat	Dilaksanakannya Musrenbang dari tingkatan Kelurahan sampai Kota dan Sosialisasi
		Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap mekanisme pengadaan barang jasa hibah kepada masyarakat oleh pemerintah	Masih ada warga yang meminta RLH berupa PB padahal dalam rap dan anggarannya adalah PK	Adanya penganggaran berkelanjutan dan sosialisasi pra pembangunan

III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokoknya melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan asas otonomi dan tugas pembantuan, meliputi : perencanaan, bangunan gedung, perumahan, PSU dan permukiman, pengendalian bangunan

III.2.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang sebagai berikut: “Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang nyaman, produktif dan berkelanjutan”

III.2.2. Sasaran

Sasaran pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman didasari oleh target capaian pelayanan yang ideal sesuai dengan referensi maupun regulasi yang relevan, yaitu dengan perhitungan yang berbasis MDGs dan SPM. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut: “Meningkatnya Penyediaan Akses (dan/ pemenuhan kebutuhan) Hunian Dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman Dan Terjangkau”

III.3. Program dan Kegiatan

Kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari program pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang, sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas maupun kegiatan belanja langsung yang telah disetujui oleh lembaga legislatif yang bertujuan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pangkalpinang. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang meliputi :

1. Program Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang;
2. Hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota;
3. Penajaman program melalui forum SKPD;
4. Penyelarasan program-program yang selanjutnya dilakukan penelaahan

sebagai program prioritas.

Dari uraian diatas dan jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program Pengembangan Perumahan

1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
4. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
5. Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
6. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)

Program Kawasan Permukiman

1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

1. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kulaifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pemabngunan dan Keuangan Daerah, maka Program dan Kegiatan beserta pendanaannya yang diajukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang pada perubahan Renja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								9.038.841.926,00	9.410.725.408,00	7.655.642.458,00	-1.383.199.468,00						2.903.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							9.038.841.926,00	9.410.725.408,00	7.655.642.458,00	-1.383.199.468,00							2.903.000.000,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							9.038.841.926,00	9.410.725.408,00	7.655.642.458,00	-1.383.199.468,00							2.903.000.000,00	
1.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah				74,96 85 Nilai Nilai	74,96 85 Nilai Nilai	6.132.348.926,00	5.398.973.736,00	4.764.697.790,00	-3.229.348.926,00							2.903.000.000,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu				100 %	100 %	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP				100 %	100 %	3.965.841.926,00	3.679.297.824,00	3.663.848.518,00	-301.993.408,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		2.903.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	3.965.841.926,00	3.599.387.236,00	3.584.413.430,00	-381.428.496,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			2.900.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0,00	1.095.500,00	620.000,00	620.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			3.000.000,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	0,00	78.815.088,00	78.815.088,00	78.815.088,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah yang ditata dan diinventarisir				100 %	100 %	30.000.000,00	95.515.088,00	95.515.088,00	65.515.088,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	95.515.088,00	95.515.088,00	65.515.088,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase kontribusi daerah terhadap PAD				0,180 %	0,180 %	0,00	1.092.000,00	546.000,00	546.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah																		
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	1.092.000,00	546.000,00	546.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN				-37,5 %	-37,5 %	150.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-150.000.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																		
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	10 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah				100 %	100 %	643.774.000,00	826.373.276,00	414.620.636,00	-229.153.364,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	19.993.000,00	19.993.000,00	9.997.000,00	-9.996.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	264.000.000,00	205.175.000,00	0,00	-264.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9.795.000,00	10.395.000,00	10.395.000,00	600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	153.659.300,00	89.479.200,00	-10.520.800,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	49.986.000,00	29.416.000,00	14.920.000,00	-35.066.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	27.271.696,00	27.271.696,00	27.271.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	180.463.280,00	162.557.740,00	162.557.740,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				-	13 Unit	0,00	0,00	52.000.000,00	52.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100 %	100 %	1.061.753.000,00	417.346.548,00	409.367.548,00	-652.385.452,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	0,00	48.543.392,00	48.543.392,00	48.543.392,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	98.400.000,00	98.400.000,00	18.400.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	981.753.000,00	270.403.156,00	262.424.156,00	-719.328.844,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik				100 %	100 %	280.980.000,00	323.949.000,00	123.400.000,00	-157.580.000,00			-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																			
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	40.250.000,00	40.250.000,00	40.250.000,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	14 Unit	219.880.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	-189.380.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	20.850.000,00	52.650.000,00	52.650.000,00	31.800.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																			
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0,00	200.549.000,00	0,00	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-				100 %	-	1.108.144.000,00	1.717.000.284,00	1.227.180.400,00	-1.108.144.000,00							0,00		
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi yang terlaksana				100 %	100 %	137.636.000,00	315.544.480,00	257.024.480,00	119.388.480,00			-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan																			
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				1 Dokumen	2 Dokumen	3.259.000,00	4.659.000,00	4.659.000,00	1.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus																			
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus				1 Dokumen	2 Dokumen	43.459.000,00	55.602.392,00	55.602.392,00	12.143.392,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	30.459.000,00	59.330.696,00	45.830.696,00	15.371.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																			
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2 Dokumen	60.459.000,00	195.952.392,00	150.932.392,00	90.473.392,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah				100 %	100 %	29.152.000,00	38.137.000,00	22.697.000,00	-6.455.000,00			-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana																			
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	2.734.000,00	5.509.000,00	5.509.000,00	2.775.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator																			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			<i>Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih</i>				20 Orang	35 Orang	4.509.000,00	6.509.000,00	6.509.000,00	2.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan																		
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan</i>				0 Orang	0 Orang	21.909.000,00	26.119.000,00	10.679.000,00	-11.230.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	<i>Persentase Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>				100 %	100 %	790.000.000,00	1.108.545.116,00	760.665.232,00	-29.334.768,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05.0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus																		
			<i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	790.000.000,00	1.108.545.116,00	760.665.232,00	-29.334.768,00	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Ketapang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	<i>Persentase layanan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang dilaksanakan</i>				100 %	100 %	141.897.000,00	254.773.688,00	186.793.688,00	44.896.688,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik																		
			<i>Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik</i>				0 Dokumen	3 Dokumen	64.354.000,00	123.242.296,00	88.002.296,00	23.648.296,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>				0 Laporan	3 Laporan	62.409.000,00	118.512.392,00	85.772.392,00	23.363.392,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum</i>				0 Laporan	3 Laporan	15.134.000,00	13.019.000,00	13.019.000,00	-2.115.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	<i>Persentase Fasilitas Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung</i>				100 %	100 %	9.459.000,00	0,00	0,00	-9.459.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.07.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)</i>				0 Laporan	1 Laporan	9.459.000,00	0,00	0,00	-9.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau				93.00 %	93.00 %	475.042.000,00	840.388.540,00	706.113.545,00	-475.042.000,00							0,00	
	1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	<i>Persentase Pengawasan dan Pengendalian Izin Pengembangan Kawasan Permukiman yang terlaksana</i>				100 %	100 %	49.975.000,00	175.716.688,00	155.491.733,00	105.516.733,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman																		
			<i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman</i>				1 Laporan	2 Laporan	49.975.000,00	175.716.688,00	155.491.733,00	105.516.733,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Persentase Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>				80 %	80 %	246.817.000,00	532.528.460,00	460.479.420,00	213.662.420,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP																		
			<i>Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T erreview/Terlegalisasi</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	73.100.000,00	235.948.384,00	214.050.844,00	140.950.844,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh																		
			<i>Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina</i>				1 Kelompok Masyarakat	1 Kelompok Masyarakat	53.127.000,00	175.164.988,00	147.534.488,00	94.407.488,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh</i>				1 Dokumen	3 Dokumen	120.590.000,00	121.415.088,00	98.894.088,00	-21.695.912,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	<i>Persentase Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha</i>				60 %	60 %	178.250.000,00	132.143.392,00	90.142.392,00	-88.107.608,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh																		
			<i>Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi</i>				1 Dokumen	3 Dokumen	178.250.000,00	132.143.392,00	90.142.392,00	-88.107.608,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
4.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota				98 %	98 %	641.605.000,00	509.425.688,00	494.559.103,00	-641.605.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh				2 %	2 %	641.605.000,00	509.425.688,00	494.559.103,00	-147.045.897,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																			
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				2 Unit Rumah	4 Unit Rumah	641.605.000,00	509.425.688,00	494.559.103,00	-147.045.897,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
5.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Perumahan dan Permukiman yang dilengkapi PSU				98.00 %	98.00 %	652.243.000,00	944.937.160,00	463.091.620,00	-652.243.000,00							0,00		
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyelenggaraan PSU Perumahan				100 %	100 %	652.243.000,00	944.937.160,00	463.091.620,00	-189.151.380,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan																			
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				0 Dokumen	1 Dokumen	59.284.000,00	151.997.288,00	123.897.288,00	64.613.288,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian																			
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				0 Lokasi	42 Lokasi	450.541.000,00	592.240.176,00	165.244.636,00	-285.296.364,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				0 Laporan	1 Laporan	42.459.000,00	97.790.696,00	95.290.696,00	52.831.696,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang																			
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				0 Laporan	1 Laporan	99.959.000,00	102.909.000,00	78.659.000,00	-21.300.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
6.	1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman				100 %	100 %	29.459.000,00	0,00	0,00	-29.459.000,00							0,00		
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Persentase Layanan Sertifikasi dan Registrasi yang dilaksanakan				100 %	100 %	29.459.000,00	0,00	0,00	-29.459.000,00			-	- -	-		0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil																			
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				0 Laporan	1 Laporan	29.459.000,00	0,00	0,00	-29.459.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER	-	- -			0,00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		J U M L A H								9.038.841.926,00	9.410.725.408,00	7.655.642.458,00	-1.383.199.468,00							2.903.000.000,00	

BAB. IV RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DAERAH

IV.1. Kaidah Pelaksana Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan)

Kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1. Sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun
2. Sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKA) SKPD setiap tahun
3. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja SKPD dalam 1 (satu) tahun

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan hasil rumusan perencanaan yang di mulai dari tingkat Kelurahan hingga tingkat Kota melalui Musyawarah Rencana Kerja Perubahan Pembangunan (MUSRENBANG) Tahun 2024. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja anggota legislatif atau reses.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar yang dilayani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah pembangunan dan rehab rumah tidak layak huni, pembangunan dan rehab jalan setapak/ jalan lingkungan, pembangunan dan rehab drainase, pembangunan talud, plat duiker, pembangunan dan pemeliharaan taman, sehingga dalam setiap kesempatan yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan selalu menyangkut atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberi usulan atau aspirasi

atas kebutuhan di daerahnya melalui kebijakan-kebijakan dari para pemangku kepentingan yang nantinya harus dialokasikan dalam Rencana Kerja Perubahan SKPD untuk tahun anggaran yang akan datang bahkan dalam tahun anggaran berjalan.

IV.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengikuti dinamika zaman dan tantangan untuk mewujudkan penataan Kota Pangkalpinang yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi harus disampaikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan yang meliputi detail/rinci Perumahan Layak Huni, Kawasan Permukiman Tanpa Kumuh, Penyediaan Sarana dan Prasarana, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi informasi serta penetapan kelembagaan dan koordinasi yang lebih efektif diantara instansi guna mendukung perencanaan dan penentuan kebijakan pembiayaan serta untuk menentukan arah kebijakan dan strategi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dan strategis, serta berkelanjutan.

BAB. V

PENUTUP

V.1. Uraian Penutup

Rencana Kerja Perubahan merupakan dokumen yang berisi program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Dinas dalam kurun waktu satu tahun. Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah menyediakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk memberi gambaran tentang kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai pelaksanaan terhadap rencana strategis Dinas dan sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah agar kegiatan dapat berjalan secara baik dan terarah sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai rencana strategis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu penyusunan Rencana Kerja Perubahan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan lebih terarah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi keuangan, hasil dan juga manfaatnya bagi masyarakat.

Selain dengan melakukan inventarisasi/pendataan berbagai data dan informasi yang relevan dalam rangka menunjang kelayakan berbagai program kerja dan kegiatan yang direncanakan, Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pangkalpinang juga merupakan implementasi dan regulasi serta kerangka kebijakan yang disusun untuk 1 (satu) tahun untuk rencana dinas.

Dari Uraian yang kami sajikan diatas, saat ini kami menyajikan Renja Perubahan Tahun 2025 berdasarkan program-program Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman yang mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengelola Keuangan Daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini, dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahunan dinas dalam rangka mendukung tujuan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang berdasarkan prinsip efisiensi dan efektif menuju terwujudnya visi dan misi kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.